

UPAYA PENGOPTIMALAN E-OFFICE DESA MELALUI SOSIALISASI OLEH DISKOMINFO KABUPATEN CIAMIS UNTUK MEWUJUDKAN SMART CITY

Billy Pratama¹, R. Rindu Garvera², Ii Sujai³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: billytama966@gmail.com¹, rindugarvera79@gmail.com²,
sudjaipnd79@gmail.com³

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

ABSTRAK

Digitalisasi menjadi hal yang diperhatikan pemerintah untuk mengusung good government. Penggunaan aplikasi digital dimaksudkan untuk mengefisienkan pelayanan publik sehingga mampu diakses dari jauh dengan menggunakan internet. Pemanfaatan e-Government juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pemilihan aplikasi digital berupa e-Office. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis melakukan sosialisasi penyebaran implementasi e-Office sebagai bentuk digitalisasi dalam mendukung terwujudnya smart city. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait sosialisasi e-Office yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi e-Office Desa di Kabupaten Ciamis, serta mengetahui faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam implementasi e-Office Desa di Kabupaten Ciamis tersebut. Adapun peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memerinci secara deskriptif temuan yang ada dilapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi untuk mengumpulkan data sekunder seperti laporan sosialisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan riwayat penggunaan e-Office guna mengukur efektivitas implementasi e-Office, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer seperti respon masyarakat terkait implementasi e-Office, teknik dokumentasi digunakan untuk mengarsipkan data sebagai bukti penguat untuk dilampirkan. teknik pengumpulan data dengan metode wawancara ditujukan kepada Desa di wilayah Kabupaten Ciamis dengan pemilihan Desa menggunakan teknik random sampling. Berdasarkan rangkaian penelitian tersebut maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan telah berjalannya e-Office namun belum optimal karena masih ditemukan hambatan.

Kata Kunci: Sosialisasi; E-Office Desa; Smart City

PENDAHULUAN

Merujuk pada amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat (2) bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa, pemerintah Kabupaten Ciamis mensosialisasikan penggunaan e-Office Desa. Berdasarkan informasi yang dilansir dari website Kabupaten Ciamis, aplikasi e-Office dapat digunakan di 258 Desa di Kabupaten Ciamis. E-Office Desa merupakan aplikasi yang memudahkan masyarakat membuat administrasi persuratan tanpa harus mendatangi kantor Desa. Dengan mengusung e-Office, menjadi alternatif digitalisasi untuk mewujudkan smart city. Pertumbuhan dan pembangunan daerah akan selalu diarahkan untuk mencapai daerah yang mandiri, sehingga menginspirasi perspektif

baru mengenai cara memanfaatkan sumber daya melalui aspirasi masyarakat untuk mengelola inovasi daerah setempat (Patricia, 2023).

Aplikasi yang berhasil diluncurkan yaitu *e-Government*. Aplikasi tersebut merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dalam pelayanan masyarakat. Tujuan diluncurkannya *e-Government* yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. *E-Government* diciptakan oleh PT. Integra Indonesia melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut PT. Integra Indonesia *e-Government* adalah sebuah langkah pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Digitalisasi secara umum menawarkan keuntungan yang paling efektif dari banyak hal yang dioptimalkan. Manfaat digitalisasi dalam sektor pemerintahan yaitu membuat setiap bidang pelayanan lebih produktif dan efisien sehingga waktu dan berbagai sumber daya yang tersedia dapat digunakan dengan potensi penuh. Arsip dokumen Digital, fotokopi berkas, dan koleksi perpustakaan Digital merupakan hasil yang paling umum dari adanya proses Digital (Patricia, 2023).

Ditengah gencarnya sosialisasi implementasi *e-Office* di Kabupaten Ciamis peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait efektivitas dari sosialisasi penerapan aplikasi digital tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul beberapa pertanyaan yakni bagaimana implementasi *e-office* di Kabupaten Ciamis dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi tersebut di kabupaten Ciamis, maka dijelaskan dalam penelitian yang berjudul "Sosialisasi *E-Office* Desa Cicontrol Oleh Diskominfo Kabupaten Ciamis Dalam Mendukung Terwujudnya *Smart City*."

KAJIAN PUSTAKA

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah kegiatan pembelajaran dalam menerima suatu ajaran baru sehingga dapat dikenal dan diterapkan. Menurut Charlotte Buhler (dalam Normina, 2014) sosialisasi diartikan sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.

2. *e-Office*

E-Office adalah program pemerintah untuk mempermudah pelayanan dalam membuat surat-surat yang diperlukan oleh masyarakat. Penerapan *e-Office* bertujuan untuk mengefisienkan pelayanan sehingga mampu diakses dengan jarak jauh melalui peramban internet. *E-Office* berperan sebagai wadah bagi masyarakat dan petugas

pelayanan masyarakat untuk menjalankan kebutuhan dan kewajibannya. Penggunaan *e-Office* diperuntukkan agar pelayanan publik tersistematis.

E-Office adalah aplikasi perkantoran untuk proses alternatif Pengelolaan proses berbasis elektronik berbasis manual dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal (LAN) dan jaringan Internet (*online*). Elektronisasi dalam kantor elektronik berarti segala pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan kantor diselesaikan secara elektronik dan dengan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi. Dengan perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini, jaringan *broadband* berkecepatan tinggi dan Internet, perkantoran telah menjadi elektronik. Pekerjaan kantor yang selama puluhan tahun dilakukan secara manual telah tergantikan menjadi elektronik. (Megawaty, 2020:177).

3. Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses perpindahan dari manual menjadi otomatis yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat kinerja manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perubahan tersebut tercipta dari inovasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Berbagai sektor mulai melirik pertumbuhan digital dan dimanfaatkan dengan baik, salah satunya sektor pemerintahan yang sudah mulai banyak menerapkan teknologi digital dalam pelayanannya. Perlu diketahui, bahwa tujuan digitiasi adalah untuk membantu masyarakat dengan memfasilitasi semua tugas dan pekerjaan sehari-hari mereka. Agar dapat mencapai tujuan pekerjaan dengan waktu dan upaya lebih cepat dari yang diperlukan (Patricia, 2023).

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan sebuah tindakan atau pengabdian aparat pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu terhadap administrasi dan sebagainya. Pelayanan publik dengan lingkup terkecil yaitu pada kantor Desa.

Pelayanan publik adalah bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena itu merupakan hak dari setiap warga negara karena dijamin oleh undang undang dan kepada pelayan publik wajib untuk melakukannya (Riani, 2021).

5. E-Government

Perkembangan digital tidak menutup kemungkinan semua aspek menerapkan digitalisasi. Hal tersebut tentu saja dilakukan untuk mengefisienkan sistem dan kinerja. Salah satu yang merasakan digitalisasi yaitu dalam pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis digital sangat memunculkan perbedaan yang signifikan.

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup pemerintahan, dengan tujuan efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga memudahkan dalam mengakses informasi

dari pemerintah. Adapun manfaat dengan menerapkannya *e-government* menurut Nurhakki (2019),

6. *Smart City*

Penerapan *smart city* dalam sistem informasi pedesaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti fasilitas yang memadai, terbatasnya akses internet, privasi dan keamanan data, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya (Hidayat, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut dipilih karena sejalan dengan penelitian yang dilakukan, serta mampu menjabarkan hasil penelitian secara detail. Metode deskriptif juga mampu mendeskripsikan fenomena yang muncul di masyarakat dengan dasar penelitian yaitu *Operational Theory analisis Framework Stope Modifikasi*.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka disusun desain penelitian dengan mengacu pada *Grand Theory* yang diimplementasikan pada digitalisasi melalui *e-Government* yang menerapkan inovasi *e-Office* di Desa pada Kabupaten Ciamis. Desain penelitian ini dirancang agar peneliti dapat menggambarkan tujuan penelitian yang dimaksud yaitu menelaah sosialisasi *e-Office* Desa serta respon masyarakat terkait implementasinya. Kemudian penelitian ini dirancang untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terlaksananya penerapan *e-Office* di Kabupaten Ciamis.

Penerapan *Grand Theory* dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur dalam menguji keberhasilan *e-Office* Desa di Kabupaten Ciamis. Penerapan enam dimensi dalam *Framework STOPE Modification* menjadi acuan terbentuknya indikator dan sumber data.

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui tiga tahapan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data terkait implementasi *e-Office* di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan sosialisasi *e-Office* yang digalakan di Kabupaten Ciamis peneliti mengobservasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi *e-Office* Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa laporan dan sistematika kegiatan sosialisasi. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data riwayat penggunaan *e-Office* Desa di Kabupaten Ciamis.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berupa informasi langsung terkait digitalisasi yang diterapkan di setiap Desa di Kabupaten Ciamis. Wawancara dilakukan kepada 7 orang informan yang diantaranya: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Layanan *e-Government* Kabupaten Ciamis, Kepala Desa Cisontról, Sekretaris Desa Cisontról, Kaur Desa Cisontról, dan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian sosialisasi *e-Office* dalam *framework* *STOPE* dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing dimensi maupun subdimensi atau isu. Setiap dimensi dievaluasi secara independen berdasarkan subdimensi untuk mengetahui masing-masing kesiapan isu. Hasil penelitian mengenai sosialisasi *e-Office* yang dilakukan di Desa Cisontról dianalisis dengan menggunakan teori *framework* *STOPE*. Teori tersebut dimodifikasi dengan mengambil 5 dimensi yaitu, dimensi Strategi (*Strategy*), dimensi Teknologi (*Technology*), dimensi Organisasi (*Organization*), dimensi Sumber Daya Manusia (*People*), dimensi Lingkungan (*Environment*). Setiap dimensi dibagi menjadi beberapa sub dimensi.

Mengacu pada teori *Framework* *STOPE* hasil modifikasi Nugroho, adapun hasil penelitian melalui wawancara dan observasi dijabarkan sebagai berikut.

1. Dimensi Strategi (*Strategy*)

Dimensi strategi (*strategy*) merupakan langkah awal dalam mencapai sesuatu. Penyusunan strategi harus dirancang dengan matang, dengan menimbang beberapa kemungkinan, dampak, dan hasil yang akan terjadi. Keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh strategi keberlangsungannya, seperti halnya sosialisasi dalam penerapan digitalisasi. Adapun hasil penelitian terkait dimensi strategi tersebut dijabarkan dalam hasil wawancara dan observasi pada tiap indikator sebagai berikut.

a. Adanya SDM

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa dimensi strategi (*strategy*) dengan indikator sumberdaya manusia bagian koordinator IT telah terpenuhi. Pemerintah Desa Cisontról telah menugaskan operator yang memegang server dan mengatur kerja aplikasi dalam lingkup Desa untuk kemudian diajukan ke pusat jika ada permohonan pelayanan dari masyarakat. Implementasi aplikasi *e-Office* melibatkan koordinator IT untuk mengatur berjalannya aplikasi dan pelayanan berbasis digital sudah berjalan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, selaras dengan yang dikemukakan oleh Lee (dalam Nurgoho, 2020) yang menemukan banyak kegagalan penerapan *e-government* terutama di negara berkembang disebabkan karena kurangnya rencana dan strategi sehingga penerapan *e-government* yang di tidak dilakukan secara sistematis dan tidak optimal.

b. Adanya perencanaan

Hasil observasi dan wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti dapat dianalisis bahwa dimensi strategi atau *strategy* dalam indikator tersebut menunjukkan bahwa dimensi strategi (*strategy*) sudah dipersiapkan dengan matang dan memenuhi indikator sehingga dapat disimpulkan hal tersebut sudah berjalan optimal. Hal tersebut sejalan dengan teori Al-Oasimi bahwa dimensi strategi (*strategy*) mengintegrasikan faktor-faktor yang berkaitan dengan “tujuan kedepan, komitmen, dan rencana terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi” (Al-Oasimi dalam Fibrian, 2019).

2. Dimensi Teknologi (Technology)

Teknologi (*technology*) merupakan hal yang sangat penting dalam digitalisasi. Teknologi menjadi acuan atau penunjang untuk keberlangsungan sistem digital. Kemajuan teknologi sangat mempermudah kerja manusia, salah satunya dalam pelayanan masyarakat. Aplikasi e-Office tentu sangat membutuhkan adanya teknologi, baik bagi instansi pusat ataupun masyarakat. Adapun hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan tiap indikator pada dimensi teknologi adalah sebagai berikut.

a. Adanya sarana dan prasarana komputer

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka dianalisis dimensi teknologi (*technology*) dengan indikator sarana dan prasarana telah dilakukan dengan optimal dan terstruktur sesuai dengan perencanaan. Tidak terdapat hambatan terkait pengadaan sarana dan prasarana. Hal tersebut sejalan dengan teori Nurgoho (2019) ketersediaan Hardware dan Software, keamanan data; telah dilakukan pengecekan, upgrade dan update berkala pada sistem perangkat keras, perangkat lunak, serta perlindungan keamanan jaringan/data adanya upaya terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dan Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika subdirektorat Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan untuk melakukan pengecekan, update dan upgrade berkala sistem perangkat keras, lunak dan keamanan data.

b. Adanya pelayanan berbasis teknologi seperti wifi/internet

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa terdapat hambatan yang terjadi dikarenakan oleh terhambatnya pendanaan untuk pengadaan akses internet gratis. Selain itu juga diperlukan pihak ketiga untuk membantu terlaksananya pemasangan ODP (*Optical Distribution Point*).

Hambatan terkait tidak tersedianya layanan internet gratis yang diakibatkan dari kesulitan pendanaan yang ditanggung anggaran Desa dan tidak adanya ODP

(*Optical Distribution Point*) dapat diupayakan dengan mengajukan surat permohonan pengadaan internet gratis ke Dinas Kabupaten Ciamis. Selain itu, pemerintah Desa Cisonrol juga mengupayakan dengan mengumpulkan dana Desa. Hal tersebut sejalan dengan teori Dukic (2016) dalam keberhasilan digitalisasi otomatisasi keseluruhan proses yang ada, keterhubungan berbagai lembaga melalui jaringan dan pemberian layanan elektronik sangat penting untuk keberhasilan digitalisasi.

3. Dimensi Organisasi (*Organization*)

Dimensi organisasi (*organization*) ditetapkan untuk membuat perencanaan implementasi agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana sosialisasi dibuat oleh pimpinan Diskominfo dan pemerintah Desa yang kemudian dibuat kebijakan yang memuat mekanisme yang mendorong implementasi *e-Office*. Adapun hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan tiap indikator pada dimensi teknologi adalah sebagai berikut.

a. Adanya kebijakan tentang teknologi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dianalisis bahwa kebijakan teknologi sudah diterapkan dan dijalankan di Desa Cisonrol dengan baik dan optimal. Kebijakan teknologi terkait pengadaan dan penerapan teknologi jangka panjang sudah disepakati oleh berbagai pihak. Kebijakan teknologi terkait keamanan dan kenyamanan pengguna sudah berjalan di atur oleh undang-undang.

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan infrastruktur dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika sehingga perlu dilakukan peningkatan bagi segi kualitas dan kuantitas infrastruktur seperti pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan. Selain itu pemerintah perlu memperkuat infrastruktur data penting dengan menegakkan privacy dan mencegah data yang disimpan di negara asing (Kominform 2018).

b. Adanya kebijakan *stakeholder*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa dimensi organisasi (*organization*) dengan indikator kebijakan *stakeholder* belum berjalan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Desa Cisonrol berkaitan dengan penerapan dan penggunaan teknologi masih belum terlibat dalam hal kolaborasi dan kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga/pihak lain.

Peneliti menganalisis bahwa hambatan-hambatan pada kebijakan *stakeholder* diantaranya kurangnya kebijakan dari pimpinan terkait anggaran untuk melakukan kolaborasi, kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain tersebut maka upayanya diharapkan pemerintah Desa Cisonrol untuk membuat kebijakan berkaitan dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi, kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain tersebut, sehingga dengan terciptanya kolaborasi, kerja sama dan kemitraan diharapkan dapat mendapatkan dan meningkatkan inovasi dan evaluasi penerus *E-Office* dalam jangka panjang, sehingga nantinya dimensi organisasi (*organization*) dengan indikator kebijakan *stakeholder* akan berjalan dengan optimal.

4. Dimensi Sumber Daya Manusia (*People*)

Dimensi sumber daya manusia (*people*) menjadi tolak ukur sejauh mana implementasi *e-Office* dapat berjalan. Menurut Gouzali Syadam, sumber daya manusia sebagai human resource yang merupakan sumber utama dalam proses kegiatan di lingkungan sekitar. Sumber daya manusia adalah sekelompok tenaga kerja yang memberikan daya dan upayanya kepada sebuah organisasi maupun perusahaan secara luas. Adapun hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan tiap indikator pada dimensi teknologi adalah sebagai berikut.

a. Adanya petugas pelayanan (operator)

Hasil analisis menunjukkan telah optimalnya indikator petugas pelayanan bahwa terdapat petugas pelayanan di Desa Cisonrol yang bertugas melayani kebutuhan dan permohonan masyarakat yang masuk melalui aplikasi *e-Office*. Adanya petugas pelayanan menjadikan implementasi aplikasi *e-Office* di Desa Csonrol dapat berjalan. Hal tersebut sejalan dengan teori Rossi (2019) proses rekrutmen yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara terpusat menjadi penyebab suatu organisasi mengalami kekurangan SDM baik kuantitas maupun kualitas sehingga perlu dilakukan rekrutmen berdasarkan kompetensi.

b. Adanya peningkatan kompetensi dengan bimtek

Pada dimensi sumber daya manusia (*people*) dengan indikator kompetensi bimtek, peneliti menganalisis bahwa petugas atau operator telah memenuhi kualifikasi, dan mengikuti sosialisasi serta pelatihan dengan cermat sehingga mampu mengaplikasikannya. UNDESA (2018) Pemerintah perlu melakukan peningkatan literasi TI dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai yang dilakukan secara terstruktur dan di evaluasi secara bertahap. Selain itu, satuan kerja yang mempunyai fungsi pendidikan dan pelatihan agar berfokus pada pelatihan yang bersifat teknis atau sesuai dengan kebutuhan direktorat. Tanpa keterampilan manusia yang dikembangkan secara strategis untuk memanfaatkan dan memelihara TIK, dalam jangka yang lebih luas akan berdampak pada kesenjangan digital (Mardiana, G., Dewi, U. T., & Nursetiawan, I., 2024).

5. Dimensi Lingkungan (*Environment*)

Dimensi lingkungan (*environment*) ditujukan terkait pengelolaan lingkungan yang mencakup keadaan teknologi yang ada pada suatu kawasan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan tiap indikator pada dimensi lingkungan (*environment*) adalah sebagai berikut.

a. Adanya pendanaan program teknologi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka hasil analisis menunjukkan bahwa pendanaan program teknologi akan menjadi hambatan bagi desa-desa yang memiliki anggaran sedikit. Teknologi yang terbilang tidak murah, tidak mengefektifkan digitalisasi jika tidak dibarengi dengan adanya pendanaan program teknologi dari pemerintah.

Adapun yang menjadi catatan kelemahan atau critical issue adalah pertama anggaran untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur *e-government* maupun

dalam rangka pengembangan SDM *e-government* masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena pemerintah lebih fokus pada pembuatan strategi dan regulasi daripada melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan pengembangan SDM (Rossi, 2019).

b. Adanya investasi modal program teknologi

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak adanya investasi modal dalam implementasi aplikasi *e-Office*. Hal tersebut tidak menjadikan kendala, namun seyogyanya mampu bernilai investasi untuk meringankan pendanaan program aplikasi di masa mendatang saat diperlukan upgrade.

Adapun hambatan yang dirasakan dari investasi modal program teknologi yaitu tidak ada nilai investasi dalam proram aplikasi *e-Office* ini. Hal tersebut menjadi hambatan karena jika di masa mendatang membutuhkan dana pemeliharaan sarana dan prasarana ataupun revitalisasi teknologi, pemerintah Desa harus mengeluarkan anggaran. Jika aplikasi ini bernilai investasi, tentunya akan mudah mengajukan pendanaan kepada kemitraan.

Diskominfo sebaiknya bekerjasama dengan *stakeholder* lain untuk membangun kerjasama. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat sekaligus menyelesaikan dua hambatan, yaitu berkaitan dengan kebijakan *stakeholder* dengan hambatan sering dirasakan *maintance* dan *miss data*, dan tentunya hambatan terkait kurangnya modal dapat diatasi juga dengan bermitra dengan para investor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan teori *Framework* STOPE yang dimodifikasi oleh Nurgroho (2019), adapun indikator yang belum optimal yaitu dalam dimensi teknologi (*technology*) yaitu indikator adanya pelayanan berbasis teknologi seperti wifi/internet, dalam dimensi organisasi (*organization*) yaitu indikator kebijakan *stakeholder*, dalam dimensi lingkungan (*environment*) yaitu indikator investasi modal. Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi *e-Office* di Desa Cicontrol sudah berjalan namun belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi *E-Office* Desa Cicontrol oleh Diskominfo Kabupaten Ciamis dalam Mendukung Terwujudnya *Smart City* sudah berjalan, akan tetapi belum optimal. Terdapat *critical issue* atau permasalahan yang ditemukan diantaranya yaitu: tidak ada akses internet gratis, tidak adanya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, tidak adanya kerjasama dengan *stakeholder* lain, dan tidak adanya rancangan investasi modal.

Hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu disebabkan oleh kurangnya kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang berpengaruh pada kesiapan organisasi yang kurang maksimal. Kerjasama antar *stakeholder* sangat penting sehingga terbentuk kolaborasi untuk sama-sama mendukung *e-Office*. Hambatan selanjutnya

keterbatasan anggaran dari pemerintah Desa untuk kegiatan kolaborasi, kerja sama dan bermitra dengan pihak ketiga atau pihak lain. Hambatan lain berkaitan dengan rancangan investasi modal yang tidak direncanakan. Tidak ada investasi modal baik jangka panjang maupun jangka pendek sehingga tidak ada keuntungan lain yang didapatkan selain untuk mengoptimalkan pelayanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan melibatkan pihak ketiga atau *stakeholder* lain untuk meminimalisir error atau tidak sinkronnya data daerah dengan pusat. Adanya kebijakan berkaitan dengan pengalokasian untuk *e-Office* tersebut. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu dengan merencanakan dan menjalankan investasi modal terkait aplikasi *e-Office*. Dengan pengadaan investasi modal dapat menjadi upaya untuk mengatasi hambatan pengadaan sarana dan prasarana. Sehingga dalam jangka panjang, investasi modal dapat meng-*cover* pendanaan untuk pengadaan teknologi dan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Oasimi, K., Alheraish, A., & Bakry, S. H. (2006). *An Integrated STOPE: Framework for e-Readiness Assessments*. Proceeding of 18th National Computer Conference. Computer Society, Saudi Arabia: Saudi.
- Fibrian, Dwi Ivan. Prihandoko. (2019), *Analisis Readiness Sistem Informasi Kepegawaian*. SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi. 11(2): 45-54.
- Hidayat, Imam. Soetarto, Hadi. (2022). *Smart City: Konsep Kota Cerdas Era Kontemporer (Studi Kebijakan Smart City di Kabupaten Sumenep)*. Jurnal Public Coerner Fisip. 17(1): 88-104.
- Mardiana, G., Dewi, U. T., & Nursetiawan, I. (2024). The Effectiveness of Digital-Based Service Innovation in The Personnel And Human Resources Development Agency Of Ciamis District. *Journal of Governance and Public Affairs*, 1(1), 61-72.
- Megawaty. (2020). *Aplikasi E-Office pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BPPD) Menggunakan Pendekatan Metode Extreme Programming*. Jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains (SAINTEK). 176-181.
- Normina. (2014). *Masyarakat dan Sosialisasi*. Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan. 12(22): 107-115.
- Nugroho, Adi Rossi. Purbokusumo, Yuyun. (2020). *E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia*. Jurnal IPTEK-KOM. 22(1): 1-17.
- Nurhakki, Andi Dian. *Implementasi E-Government Pemerintah Kota Parepare dan Perilaku Bermedia Masyarakat*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Patricia, Erika. Hayat. Suyeno. (2023). *Implementasi E-Office Sabdopalon Jombang Sebagai Langkah Menuju Pemerintahan Digital*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 9(1): 77-89.

Riani, Ketut Ni. (2021). *Strategi Peningkatan Pelayanan Publik*. Jurnal Inovasi Penelitian. 1(11).

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.